

# KAJIAN PEMETAAN DAN OPTIMALISASI POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA JAYAPURA

Andika Rante<sup>1</sup>

[andika\\_rante@gmail.com](mailto:andika_rante@gmail.com)

Sarlota Arrang Ratang<sup>2</sup>

[ratangsarlota@yahoo.com](mailto:ratangsarlota@yahoo.com)

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih,

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Ilmu Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

## Abstraksi:

Sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Andreas dan Firma, 2013). Selain pajak daerah, retribusi daerah juga penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di jalan umum, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi jenis usaha terdiri dari retribusi terminal dan retribusi rumah potong hewan, sedangkan retribusi perijinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin keramaian, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pemindahan kendaraan bermotor, dan retribusi izin pencari kerja. Alasan peneliti memilih seluruh Kota Jayapura sebagai objek penelitian dikarenakan Kota Jayapura memiliki berbagai sumber penerimaan yang sangat potensi baik dalam menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah. Maka untuk menunjang hal diatas diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperbaiki pendapatan masyarakat (Mahi, 2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). kontribusi pajak daerah terhadap PAD kota Jayapura tahun 2010-2017 yang memberikan kontribusi terbanyak adalah pajak restaurant, Sedangkan kontribusi retribusi daerah yang memberikan kontribusi terbanyak adalah perijinan tertentu yaitu rata-rata 17% 2). Potensi Pajak daerah dan Retribusi daerah di Kota Jayapura, berdasarkan analisis *overlay* pajak restoran, pajak reklame dan penerangan jalan, 2011-2017 memiliki klasifikasi prima sedangkan hotel, hiburan dan pajak parkir diklasifikasikan rata-rata prima dan ada satu tahun yaitu 2017 dan 2016 ada masing-masing satu klasifikasi adalah potensial. Untuk Pajak mineral non logam diklasifikasikan sebagai terbelakang, potensial dan berkembang, walaupun lebih banyak dikatakan terbelakang. 3). Usaha-Usaha Dispenda dalam meningkatkan PAD kota Jayapura adalah dengan usaha pokok terdiri dari adanya dasar hukum yang jelas dan tegas, Objek terdata dengan baik, Kesungguhan dan tanggung jawab petugas pemungut, Kontrol yang kontinue dari pejabat yang berwenang dan adanya peningkatan koordinasi. Selanjtnya kedua adalah Usaha Pendukung yang terdiri dari Teknik-teknik dalam pemungutan, Sosialisasi atau memasyarakatkan peraturan, Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan kemampuan personil Dan yang terakhir adalah Usaha kordinasi.

**Kata Kunci :** Pemetaan, Optimasilisai, Pajak Retribusi, PAD.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara (Vina.dkk, 2010). Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail, 2011). Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Maka dari hal tersebut pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak rakyatnya, dalam arti lain pemerintah daerah harus adil melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri.

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digalidari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi, 2011). Beberapa komponen Pendapatan asli daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan

pajak parkir (Andreas dan Firma,2013).Selain pajak daerah, retribusi daerah juga penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di jalan umum,dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi jenis usaha terdiri dari retribusi terminal dan retribusi rumah potong hewan, sedangkan retribusi perijinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin keramaian, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pemindahan kendaraan bermotor, dan retribusi izin pencari kerja.

Alasan peneliti memilih seluruh Kota Jayapura sebagai objek penelitian dikarenakan Kota Jayapura memiliki berbagai sumber penerimaan yang sangat potensi baik dalam menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah. Maka untuk menunjang hal diatas diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru,dan memperbaiki pendapatan masyarakat (Mahi,2002).Karena dengan hal tersebut akan menciptakan peningkatan penerimaan atau pendapatan daerah itu sendiri hal tersebut didukung oleh Riza I(2011) menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah faktor ekonomi. Dalam hal ini dapat dilihat dari Pertumbuhan PAD dan retribusi Daerah, potensi menggunakan analisis *Overlay* dan strategi apa saja yang akan diambil untuk meningkatkan PAD Kota Jayapura.

## B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang akan dikemukakan adalah :

- a) Untuk menganalisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , penerimaan pajak , retribusi daerah di Kota Jayapura tahun 2010-2017 .
- b) Untuk menganalisis potensi pemetaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura.
- c) Untuk menganalisis usaha Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura.

## METODE PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura dengan pertimbangan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura selama periode tahun 2010 hingga tahun 2017 secara umum terus mengalami peningkatan, pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu komponen PAD juga memiliki peran yang relatif penting terhadap keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### B. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data, dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara dan observasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif yang digunakan dalam menghitung efisiensi dan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah, serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah. Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Untuk melihat dan menganalisis pertumbuhan PAD, Pajak Daerah dan Retribusi daerah digunakan rumus:

$$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100 \%$$

Di mana:

Gx = Laju Pertumbuhan

Xt = tahun tertentu

Xt-1 = tahun sebelumnya

2. Untuk menentukan potensi penerimaan jenis pajak dan jenis retribusi dilakukan pendekatan menggunakan analisis Overlay. (Jaya:1996,29-30):

<b>KontribusiPertumbuhan</b>	<b><math>wXi \geq 1</math> (tinggi)</b>	<b><math>wXi &lt; 1</math> (rendah)</b>
$wXi \geq 1$ (tinggi)	Prima	Berkembang
$wXi < 1$ (rendah)	Potensial	Terbelakang

Sumber (Jaya:1996,29-30)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Laju pertumbuhan sektor pajak dan Retribusi daerah Kota Jayapura

**Tabel 1. Rata-rata Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Kota Jayapura Tahun 2010-2016**

No	Jenis Pajak dan Retribusi	Tahun								Rata-rata %	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Pajak	Pajak Hotel	0	31	27	16	16	14	28	(3)	18
2		Pajak Restorant	0	10	20	25	33	19	27	18	22
3		Pajak Hiburan	0	47	103	112	64	7	0,5	-1,6	47
4		Pajak Reklame	0	25	12	4	9	15	13	19	14
5		Pajak Penerang Jalan	0	26	2	24	21	20	2,6	12	15
6		Pajak Parkir	0	66	13	90	17	44	-7,4	100	46
7		Pajak Mineral bukan logam	0	-71	-36	28	-84	-100	-100	15	-50
8		Pajak BPHTB	0	0	506	35	48	6	0,9	18	88
9	Retribusi	Jasa Umum	0	11	(79)	249	(25)	16	(11)	2	32
10		Jasa Usaha	0	(3)	(7)	271	11	8	5	13	43
11		Perizinan Tertentu	0	12	28	40	(10)	12	(33)	7	8

Sumber Data : Diolah (2018)

### B. Kontribusi sektor pajak dan Retribusi daerah Kota Jayapura Terhadap PAD

**Tabel 2. Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap PAD Kota Jayapura Tahun 2010 – 2017**

No	Jenis Pajak dan Retribusi	Tahun								rata-rata	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Pajak	Pajak Hotel	12	12	13	11	10	10	12	11	13
2		Pajak Restorant	19	17	16	15	15	17	20	21	20
3		Pajak Hiburan	2	2	4	6	8	7	7	6	6
4		Pajak Reklame	5	5	4	4	3	3	3	3	4
5		Pajak Penerang Jalan	13	14	11	11	10	11	10	10	12
6		Pajak Parkir	0	1	1	1	1	1	1	1	1
7		Pajak Mineral bukan logam	9	22	11	11	1	0	0	0	8
8		Pajak BPHTB	0	3	13	14	15	14	14	15	12
9	Retribusi	Jasa Umum	20	18	3	8	5	5	4	4	10
10		Jasa Usaha	1	1	1	2	2	2	2	2	2
11		Perizinan Tertentu	20	18	19	20	13	14	8	9	17

Sumber Data : Diolah (2018)

### C. Analisis Overlay Untuk Identifikasi Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam PAD Kota Jayapura

Tabel 3. Klasifikasi Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 – 2017

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	TAHUN											KLASIFIKASI									
		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		P	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P	K							
1	Pajak Hotel	31	12	27	13	16	11	16	10	14	10	28	12	(3)	11	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	POTENSIAL
2	Pajak Restoran	10	17	20	16	25	15	33	15	19	17	27	20	18	21	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA
3	Pajak Hiburan	47	2	103	4	112	6	64	8	7	7	0.5	7	-1,6	6	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	POTENSIAL
4	Pajak Reklame	25	5	12	4	4	4	9	3	15	3	13	3	19	3	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA
5	Pajak Penerang Jalan	26	14	2	11	24	11	21	10	20	11	2,6	10	12	10	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA
6	Pajak Parkir	66	1	13	1	90	1	17	1	44	1	-7,4	1	100	1	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	POTENSIAL	PRIMA
7	Pajak Mineral bukan logam	-71	22	-36	11	28	11	-84	1	-100	0	-100	0	15	0	POTENSIAL	POTENSIAL	PRIMA	POTENSIAL	TERBELAKANG	TERBELAKANG	BERKEMBANG
8	Pajak BPHTB	0	3	506	13	35	14	48	15	6	14	0,9	14	18	15	POTENSIAL	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	POTENSIAL	PRIMA
9	Jasa Umum	11	18	(79)	3	249	8	(25)	5	16	5	(11)	4	2	4	PRIMA	POTENSIAL	PRIMA	POTENSIAL	PRIMA	POTENSIAL	PRIMA
10	Jasa Usaha	(3)	1	(7)	1	271	2	11	2	8	2	5	2	13	2	PRIMA	POTENSIAL	POTENSIAL	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA
11	Perizinan Tertentu	12	18	28	19	40	20	(10)	13	12	14	(33)	8	7	9	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA	PRIMA

Sumber data: diolah (2018)

Identifikasi terhadap jenis pajak dan retribusi Kota Jayapura dilakukan dengan melihat pertumbuhan dan kontribusinya. Hasil perhitungan pertumbuhan dan kontribusi tersebut dilakukan matrik berdasarkan *analisis overlay* sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Dan berdasarkan *analisis overlay* pajak restoran, pajak reklame dan penerangan jalan, 2011-2017 memiliki klasifikasi prima sedangkan hotel, hiburan dan pajak parkir diklasifikasikan rata-rata prima dan ada satu tahun yaitu 2017 dan 2016 ada masing-masing satu klasifikasi adalah potensial. Untuk Pajak mineral non logam diklasifikasikan sebagai terbelakang, potensial dan berkembang, walaupun lebih banyak dikatakan terbelakang.

Retribusi jasa umum, dan perizinan tertentu dalam perhitungan *analisis overlay* masuk pada kategori prima dan potensial lain halnya dengan jasa usaha masuk kategori prima.

Dari matrik berdasarkan *analisis overlay* dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura sebagai berikut:

- Mencermati pertumbuhan dan kontribusi jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi di Kota Jayapura, maka perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu dengan: (a) melakukan perhitungan potensi setiap jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena berdasarkan pengamatan lapangan penetapan target pendapatan setiap jenis PAD masih dilakukan secara *incremental* sehingga belum menggambarkan potensi yang sebenarnya. (b) melakukan sinergi antara Pemerintah Kota Jayapura dan DPRD Kota Jayapura melalui koordinasi dan komunikasi dalam meningkatkan pendapatan jenis PAD.
- Dari hasil perhitungan analisis overlay dapat diketahui pertumbuhan dan kontribusi jenis PAD di Kota Jayapura sebagian besar teridentifikasi prima. Hal ini sudah cukup bagus tetapi perlu dilakukan peningkatan untuk yang berkembang dilakukan peningkatan kontribusi terhadap total pendapatannya seiring dengan tingkat pertumbuhan total pendapatan masing-masing jenis PAD. Peningkatan untuk yang terbelakang melalui peningkatan pertumbuhan dan kontribusi seiring dengan peningkatan total pendapatan masing-masing jenis PAD.
- Pengelolaan sumber pendapatan daerah seperti pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perlu diidentifikasi karena banyak sumber-sumber pendapatan yang belum dikelola secara tepat, serta pengawasan yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalam pemungutan pajak belum maksimal, Badan Layanan Umum Daerah perlu ditingkatkan pengelolaan manajemen dan pengelolaan keuangan secara terbuka, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Daerah.
- Jenis Pajak yang merupakan salah satu jenis PAD yang memiliki laju pertumbuhan tinggi dan juga merupakan jenis pajak yang paling berpotensi untuk dikembangkan di Kota Jayapura. Untuk itu perlu diadakan pendataan kembali subjek dan objek subjek dan objek jenis pajak yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui

permutakhirandatasubjek danobjekpajak.Selainitu proses penetapan target seharusnya memperhatikanpotensi yangsebenarnya sehingga pemerintah akan terpacu untuk mencapai target tersebut dan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini

- e). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferida Sulistyawati(2014) meneliti tentang Analisis potensi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan asli daerah di Kota Metro, Hasil penelitian ini menunjukkan analisis overlay bahwapajakrestorankategori prima. Tetapi bertolak belakang dengan Pajak bumi danbangunan di Kota Metro yang kategori prima sebab hasil penelitian di Kota Jayapura menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan masuk dalam kategori berkembang bukan prima.

## **Usaha-Usaha Dispenda Dalam Pemungutan**

### **1) Usaha Pokok**

Yang dimaksud dengan usaha pokok adalah usaha yang dilakukan dalam rangka pemungutan dan peningkatan PAD antara lain adalah :

- a. Adanya dasar hukum yang jelas dan tegas  
Untuk dapat berjalannya suatu pungutan, hendaklah didukung oleh peraturan yang memuat secara tegas dan rinci tentang objek pemungutan, subjek pungutan, tata cara pelaksanaan, tarif dan sanksinya agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan. Jika dalam peraturan yang belum diatur secara tegas dan rinci hal tersebut diatas dapat disempurnakan dengan melahirkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) untuk pelaksanaan peraturan tersebut.
- b. Objek terdata dengan baik  
Sebelum dilakukan pemungutan terhadap PAD hendaknyapotensi objek PAD telah terdata dengan baik. Hal ini dapat digunakansebagai alat untuk mengukur apakah objek PADtersebut sudah memenuhi aspek ekonomis dan aspek teknis.
- c. Kesungguhan dan tanggung jawab petugas pemungut  
Dalam hal ini ketegasan dan perbinaan dari atasan terhadap bawahan sebagai petugas pemungut sangat diperlukan, agar bawahan tidak merasa terbebani melainkan merasa diberi kepercayaan untuk menjalankan tugasnya, sehingga akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Kontrol yang kontinue dari pejabat yang berwenang  
Walaupun tugas sudah dibagikan kepada para bawahan, bukan berarti tanggung jawab telah berpindah kepada bawahan.Oleh sebab itu untuk mengetahui apakah suatu tugas sudah berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan kontrol yang kontinue dari pejabat yang berwenang. Disamping itu bawahan yang diberi tugas akan merasakan bahwa tugas yang dilakukannya diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.
- e. Adanya peningkatan koordinasi  
Dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD, kordinasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan, sehingga diharapkan semua pihak dapat mendukung kebijaksanaan tentang upaya peningkatan Pendapatan Daerah.Dalam hal ini misalnya dengan instansi terkait dan aparat yang mungkin dapat mendukung pelaksanaan tugas yang dilaksanakan.

### **2) Usaha Pendukung**

Untuk kelancaran pemasukan pendapatan daerah diperlukan usaha pendukung yang antara lain sebagai berikut :

- a. Teknik-teknik dalam pemungutan  
Dalam pelaksanaan pemungutan PAD terlebih dahulu harus diketahui subjek atau orang yang akan membayar pungutan/ tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang mau membayar kewajibannya, diantaranya dikarenakan oleh rasa takut, rasa segan atau malu terkena sanksi ataupun hal-hal yang akan merusak citranya sendiri. Sebagai petugas pemungut harus jeli mengkategorikan hal-hal yang akanmenyebabkan orang akan membayar kewajibannya tersebut.
- b. Sosialisasi atau memasyarakatkan peraturan  
Upaya pendukung lainnya yaitu dengan cara memasyarakatkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang PAD, guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan kemampuan personil Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan suatu organisasi yang berwenang melaksanakan dan mengurus bidang pendapatan daerah. Seperti pajak, retribusi

dan semua penerimaan lainnya yang menjadi sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban dan berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah setiap tahunnya.

### 3) Usaha kordinasi

Dalam upaya melaksanakan koordinasi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melibatkan Kepala Daerah dan unsur Muspida lainnya untuk menegakkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan peranan Dinas/instansi/lembaga yang langsung mempunyai sumber pendapatan daerah untuk mengelola sumber-sumber tersebut baik dalam rangka intensifikasi maupun ekstensifikasi dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
- c. Mendorong lebih aktif peranan instansi penunjang dan instansi pendukung untuk secara bersama-sama ikut memikirkan dan secara terkoordinasi mengupayakan peningkatan pendapatan daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferida Sulistyawati(2014) meneliti tentang Analisis potensi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan asli daerah di Kota Metro, bahwa makaperlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap jenis pajak daerah agar mengalami peningkatan pertumbuhan dengan mengurangi fluktuasinya.

## PENUTUP

### A. Simpulan

Bertolak dari hasil analisa data dan penjelasan penelitian pada Bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan:

1. Setelah di analisa bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD kota Jayapura tahun 2010-2017 yang memberikan kontribusi terbanyak adalah pajak restaurant yaitu rata-rata 20% dan pajak parkir yang memberikan kontribusi paling sedikit terhadap PAD Kota Jayapura rata-rata sebesar 1%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD kota Jayapura tahun 2010-2017 yang memberikan kontribusi terbanyak adalah perijinan tertentu yaitu rata-rata 17% dan jasa usaha yang memberikan kontribusi paling sedikit terhadap PAD Kota Jayapura rata-rata sebesar 2%.
2. Untuk melihat potensi Pajak daerah dan Retribusi daerah di Kota Jayapura, berdasarkan analisis overlay pajak restoran, pajak reklame dan penerangan jalan, 2011-2017 memiliki klasifikasi prima sedangkan hotel, hiburan dan pajak parkir diklasifikasikan rata-rata prima dan ada satu tahun yaitu 2017 dan 2016 ada masing-masing satu klasifikasi adalah potensial.. Untuk Pajak mineral non logam diklasifikasikan sebagai terbelakang, potensial dan berkembang, walaupun lebih banyak dikatakan terbelakang.
3. Usaha-usaha Dispenda dalam meningkatkan PAD kota Jayapura adalah dengan usaha pokok terdiri dari adanya dasar hukum yang jelas dan tegas, Objek terdata dengan baik, Kesungguhan dan tanggung jawab petugas pemungut, Kontrol yang kontinue dari pejabat yang berwenang dan adanya peningkatan koordinasi. Yang kedua adalah Usaha Pendukung yang terdiri dari Teknik-teknik dalam pemungutan, Sosialisasi atau memasyarakatkan peraturan, Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan kemampuan personil Dan yang terakhir adalah Usaha kordinasi.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Melihat pertumbuhannya pajak reklame dan retribusi perizinan tertentu yang paling rendah dalam pertumbuhannya maka pemerintah harus lebih memperhatikan pada sektor pajak ini baik dalam teknik pengumpulan atau penarikan pajak dan usaha-usaha lainnya agar ditahun mendatang dapat meningkatkan pertumbuhannya dalam peningkatan PAD Kota Jayapura.
2. Hasil analisis Overlay menunjukkan bahwa Untuk Pajak mineral non logam diklasifikasikan sebagai terbelakang dan berkembang, walaupun lebih banyak dikatakan terbelakang, maka disarankan agar lebih lagi melihat sebenarnya bisa dinaikkan statusnya menjadi prima dengan melihat Kota Jayapura sangat Kaya akan SDA yang apabila lebih ditingkatkan lagi penarikan pajak ini maka kedepan pajak ini akan masuk dalam kategori Prima.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Andreas Suryo Adi dan Firma. 2013. *Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis.8(2); pp 55-65. Bhuno Agung. 2005. *Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta. Andi Offset.
- [2]. Badan Pusat Statistik Nasional. 2012. *Data Keuangan seluruh Kabupaten di Indonesia*. Jakarta.
- [3]. Daniel Ho, Wong.2009. "A Study of Hongkong Tax Compliance Ethics". <http://www.google.e-journal.com>. Diunduh 13, 5, 2013
- [4]. Diana.2013. *Influence Of Local Tax And Local Retributions Toward The Local Financial Independence*. <http://www.google.com>. Diunduh 13, 5, 2013
- [5]. Ebimobowei, Peter.2013. *A Causalty Analysis between Tax Auditand Tax Compliecin Nigeria*. European Journal of Business Management. 5(2).
- [6]. Evi Apriani.2011. *Penaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kota Tasikmalaya (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*. <http://jounal.unsil.ac.id>. Diunduh 9, 6, 2013.
- [7]. Fakhrukhshan Nugroho. 2010. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis terhadap Kota Batu periode Januari 2008 - Juni 2010)*. <http://library.um.ac.id>. Diunduh 13, 5, 2013
- [8]. Ferida Sulistyawati (2014) meneliti tentang Analisis potensi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan asli daerah di Kota Metro,
- [9]. Ismail Tjip. 2011. *Paradigm Change of Local Tax*. *Journal of administrative Science and Organization*.18 (1).Pp 34-42.
- [10]. Imam Muklis.2010. *Pengaruh Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Seminar Regional Perpajakan pada Universitas Negeri Malang. <http://wordpress.com>. Diunduh 21, 6, 2013.
- [11]. Krisna Arta Anggar (2013) tentang Analisis Pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD sekabupaten Bali.
- [12]. Jeffrey G. Murphy. 2012. *Marxism and Retribution*. *Philosophy & Public Affairs*.2(3).Pp 217- 243. <http://www.jstor.org>. Diunduh 1, 8, 2013.
- [13]. Junius Nanda Purna Ebtawan (2012) meneliti tentang Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2002-2011
- [14]. Mahi Raksaka .2002. *Managing Local Revenue in Indonesia*. *Journal of Georgia University, Atlanta*.
- [15]. Marteen, et al. 2001. *Partisan Influence on the Local Tax Burden in the Netherland*. *Public Choice*. Pp 351-363.
- [16]. Mardiasmo. *Perpajakan*. 1999. Edisi Ketiga. Bulaksumur. Andi Yogyakarta
- [17]. Magdalena Letsoin. 2010. *Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2006-2010*. Laporan Praktek Kerja Lapangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, Semarang. <http://eprints.unika.ac.id> Diunduh 12, 5, 2013.
- [18]. Mulyadi Soamole. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (studi di Kabupaten Kepulauan Sula)*. <http://ejournal.unsrat.ac.id>. Diunduh 13, 5, 2013.
- [19]. Pangestu Djarwanto. *Statistik Induktif*. 2005. Edisi Kelima. BPFEUGM. Yogyakarta.
- [20]. Vina, Rizal Efendi, Ratna Juwita. 2010. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi*. <http://eprints.mdp.ac.id>. Diunduh 11, 5, 2013.
- [21]. Robert A Simanjuntak. 2002. *Evaluation Criteria on the Effort to Increase Local Tax Base A Case Study of Indonesia Decentralizing Era*. *Journal of Georgia State University*. Atlanta.
- [22]. Rizal Fariq Mustofa. 2011. *Determinant of Tax Compliance in Asia: A Case Of Malaysia*. *European Journal of Social Science*. 24(1). Pp: 7-32
- [23]. Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Ke 15. Bandung. CV Alfabeta.
- [24]. Waliludin, Husein. 2013. *The Influence Of Local Taxes And Levels Towards Expenditure Allocation In Gorontalo*. *IJRRAS*, 15(2). Pp: 1-12.
- [25]. Yenni Del Rosa. 2012. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*. *E-Jurnal Pelangi STKIP PGRI Sumbar*, 4(2).